

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA
KEUANGAN PADA BPKPAD PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

SKRIPSI

Oleh

SISKA DWI HASTUTI

NIM 1057304730 14



**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA
KEUANGAN PADA BPKPAD PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

SKRIPSI

**Oleh
SISKA DWI HASTUTI
NIM 1057304730 14**

*Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Jurusan Akuntansi*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan sebagai tanda cinta dan sayang untuk :

- Ibu dan Ayah tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasihku yang tiada terhingga.
- Kakak dan adik tersayang besertakeluarga tercinta
- Seluruh dosen dan almamaterku terkhusus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Sahabat-sahabat terbaikku dan teman-teman Akuntansi 3-2014

MOTTO HIDUP

Jangan terfokus pada setitik noda dikertas putih

Jangan melihat selumbar dimata saudaramu, sedangkan balok dimatamu tidak engkau ketahui

Jangan hanya terfokus dengan satu kesalahan saudaramu hingga engkau lupa banyaknya kebaikan yang ia lakukan

Kesalahan adalah senjata untuk meraih masa depan lebih baik. Berusaha,berdo'a dan berserah diri pada sang pencipta karna segala sesuatu pasti ada waktunya.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pada BPKPAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar"
Nama Mahasiswa : Siska Dwi Hastuti
No. Stambuk/ NIM : 10573 04730 14
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan di ujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 27 Oktober 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 27 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Drs. H. Sultan Sarda, MM
NIDN : 0015075903

Pembimbing II

Muttiarni, SE., M.Si
NIDN : 0930087503

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903678

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badolatti, SE., M.Si., AK., CA.CSP
NBM : 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama SISKHA DWI HASTUTI, NIM 105730473014, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : M, tanggal H/M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Safar 1440 H
27 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE.,MM (.....)
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agussalim HR, SE.,MM (.....)
2. Linda Arisanti Razak, SE., M.Si.Ak.CA (.....)
3. Andi Arman, SE., M.Si.Ak.CA (.....)
4. Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SISKI DWI HASTUTI
Stambuk : 10573 04730 14
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pada BPKPAD Pemerintahan kabupaten Kepulauan Selayar

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 27 Oktober 2018


Yang Membuat Pernyataan,



Siska Dwi Hastuti

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Program Studi,


Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078


Ismeit Badollahi, SE., M.Si., AK., CA., CSP
NBM : 107 3428

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pada BPKPAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Muh. Toso dan ibu Andi Asriani yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Drs. H. Sultan Sarda, MM, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Muttiarni, SE.,M.Si, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak / Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Proposal ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 14 Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

SISKA DWI HASTUTI, 2018 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pada BPKPAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Pak Sultan Sarda dan Pembimbing II oleh Ibu Muttiarni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan, pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan, secara simultan maupun parsial pada badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008 sampai 2017. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan statistik dengan SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat disimpulkan bahwa pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh negative dan tidak signifikan yang diperoleh koefisien jalur sebesar -0,265 dan pengaruh belanja modal signifikan sebesar 0,459, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan diperoleh koefisien jalur sebesar 0,861 dan pengaruh pendapatan asli daerah signifikan sebesar 0,010, dan belanja modal berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan tetapi belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah sebesar 97,8% dan sisanya sebesar 2,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

Kata Kunci : *Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan.*

ABSTRACT

SISKA DWI HASTUTI, 2018 Effect of Capital Expenditures on Regional Original Income and Its Impact on Financial Performance at BPKPAD Government of Selayar Islands Regency, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Sultan Sarda and Counselor II by Ms. Muttiarni.

This study aims to determine how the influence of capital expenditure on local revenue (PAD), and the effect of PAD on financial performance, the effect of capital expenditure on financial performance, simultaneously or partially on financial management, revenue and asset of Kepulauan Selayar District in 2008 up to 2017. The type of research used in this study is to use a quantitative descriptive approach. The processed data is the data of the realization of the Selayar Regency Regional Budget (APBD) in 2008 to 2017. The calculation technique used in this study is to use statistical calculations with SPSS. Based on the results of calculations and data collection reports on the realization of the revenue and expenditure budget of Selayar Islands District, it can be concluded that the effect of capital expenditure on local revenue has a negative and insignificant effect obtained by path coefficient of -0,265 and the effect of significant capital expenditure of 0,459, influential local revenue positive and significant towards financial performance obtained path coefficient of 0,861 and the influence of significant regional original income of 0,010, and capital expenditure has a negative effect or does not affect the financial performance but capital expenditure affects the financial performance through local revenue of 97,8% and the remaining amount 2,2% is influenced by other variables outside the research.

Keywords: *Capital Expenditures, Regional Original Income, Financial Performance.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ii
HALAM PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teori	7
B. Tinjauan Empiris.....	19
C. Kerangka Konsep.....	27
D. Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Definisi Variabel dan Operasional Variabel.....	31
D. Populasi dan Sampel	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran umum objek penelitian	37
B. Hasil dari Penelitian.....	45
C. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2000 telah mengalami era baru, yaitu dengan dilaksanakannya otonomi daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah ini ditandai dengan diserahkannya sejumlah kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan dimana pemerintah daerah mempunyai hak untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Hal ini diharapkan agar pemerintah daerah semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan yang baik yang dilakukan secara ekonomis, efektif, efisien yang bisa menghasilkan sistem keuangan yang akuntabel, transparan, serta mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh daerah sesuai kemampuan dan potensi sumber daya yang dimilikinya diperlukan untuk menunjang kemampuan suatu daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan ini juga tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi pemerintah

kabupaten/kota menunjukkan kemampuannya dalam pengelolaannya terhadap daerahnya masing-masing dalam menunjukkan kinerja keuangannya.

Pemerintah daerah perlu mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang ada di daerah untuk mendukung jalannya kemandirian suatu daerah. Sumber-sumber daya yang telah dikelola oleh pemerintah daerah menjadi salah satu pendanaan bagi belanja daerah khususnya diarahkan pada belanja modal, karena belanja modal menjadi pendukung dari peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan publik. Dan pelayanan publik ini merupakan salah satu indikator bagi penilaian kinerja pemerintah dalam mengemban amanah dari rakyat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan kinerja keuangan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan dapat dilakukan analisis keuangan terlebih dahulu, setelah mengetahui hasilnya maka dapat diketahui baik buruknya kinerja dari suatu daerah.

Pendapatan daerah kabupaten kepulauan selayar dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas : pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah ini adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah setiap daerah itu berbeda, untuk daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan yang berlimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar dibanding daerah yang lainnya. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah juga semakin meningkat . Setiap kabupaten/kota memiliki ciri-ciri dan potensi tersendiri yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya sehingga menimbulkan pendapatan dan pengeluaran yang berbeda pula.

Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh Darwanis dan Ryanda Saputra (2014) dengan judul pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan dampaknya pada kinerja keuangan pemerintah daerah dan hasilnya adalah belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah.

Melihat pentingnya peningkatan dan kemajuan ekonomi bagi suatu daerah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pertumbuhan kinerja keuangan dan akan dilakukan dalam penelitian ini dengan judul Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pada BPKPAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ?
2. Apakah PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan melalui PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Untuk mengetahui apakah PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Untuk mengetahui apakah Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan melalui PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap kajian tentang pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan dampaknya pada kinerja keuangan dapat memberikan sumbangan teori bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang akuntansi dan diharapkan dapat memberikan masukan/informasi pada Badan Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan informasi tentang pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan dampaknya pada kinerja keuangan pada BPKPAD pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai salah satu syarat sidang sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

- b. Dapat memberikan masukan bagi para penulis guna memberikan informasi sebagai salah satu syarat sidang sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- c. Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa atau pihak manapun yang berminat dalam melakukan penelitian yang terkait dengan tema penulisan ini di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Belanja Modal

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. Dalam hal ini pembelanjaan modal yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Winda (2017) belanja modal merupakan belanja yang dibutuhkan untuk menyediakan aset tetap yang dibutuhkan pemerintah, baik untuk operasional maupun untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang bersangkutan seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya.

Darwanis (2014) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut I Putu (2014) belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat.

Dari beberapa definisi definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

2. Jenis-jenis Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah,

pengesongan, pengurungan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampul tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penggantian/penambahan/peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta

perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

3. Kriteria Belanja Modal

Untuk mengetahui apakah suatu barang dapat dikelompokkan kedalam belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

1. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik yaitu berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.
2. Kriteria kapitalisasi aset tetap, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya (*threshold capitalization*), sehingga pejabat/aparat penyusun anggaran dan/atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.

4. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Hal ini menunjukkan suatu indikasi

yang kuat bahwa jika pendapatan asli daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Semakin baik PAD suatu daerah maka akan semakin besar pula alokasi belanja modalnya.

Menurut Farah (2017) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan yang semakin meningkat berasal dari pendapatan daerah yang diberikan untuk mengelola sumber keuangan yang akan terus dipacu.

Menurut Darwanis (2014) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Ni Luh (2015) pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menurut Nuarisa (2013) Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas tentang Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan PAD adalah sesuatu yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah.

a. Hasil Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah: "luran yang

dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”

b. Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 Tahun 2009).

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bias dengan menerbitkan obligasi daerah.

6. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja (Performance) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya measurement atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang tercapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilai yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Menurut Nugroho (2012) kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang melakukan realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Menurut Darwanis (2014) mengungkapkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara

keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 37 tentang pengelolaan keuangan daerah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Menurut Abdullah (2015) menyatakan kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada ukuran kinerja yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi.

Fahmi (2012) Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas

berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Dari sejumlah pengertian kinerja keuangan di atas, dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.

7. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus-menerus dan pencapaian tujuan dimasa mendatang.

Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Menurut Widodo (Halim, 2002 : 126) hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk :

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

8. Rasio-Rasio Kinerja Keuangan Daerah

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah atau rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung menggunakan persamaan berikut ini (Mahmudi, 2011) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Artinya, rasio ini merupakan hasil perbandingan (nisbah) antara APBD yang terealisasi dengan APBD yang ditargetkan (Halim 2007). Rasio efektivitas keuangan daerah dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan APBD, maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah, maka daerah telah menggunakan APBD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Mahmudi, 2002). Perhitungan rasio efisiensi yaitu :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Kemampuan Daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90%-100% adalah kurang efisien, 80%-90% adalah cukup efisien, 60%-80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

d. Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja Daerah)

Rasio aktivitas (Keserasian Belanja Daerah) adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rasio keserasian dapat diukur sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

e. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)

Rasio pertumbuhan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah/pemerintah kota dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya dengan mengetahui pertumbuhan untuk masing-masing komponen penerimaan (PAD dan total pendapatan) dan pengeluaran (belanja pembangunan). Menurut Halim (2008 : 235) rasio pertumbuhan dapat diukur dengan :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

r = pertumbuhan dalam persen

P_n = realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ke-n

P_0 = realisasi pendapatan dan belanja pada tahun awal atau tahun sebelumnya

B. Tinjauan Empiris

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darwanis (2014) dengan judul "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah, PAD yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah.

Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Agus Wahyudin (2014) dengan “judul Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota diJawa” yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DBH, dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel DAU mempunyai arah negative dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Farah Wahyu Fauzia (2017) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal” yang menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan Putu Milan Pratnyantari (2017) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Belanja Daerah Dan Belanja Modal Pada IPM Dengan Variabel Pemoderasi Dana Alokasi Umum” dengan metode penelitian yaitu metode kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah mampu meningkatkan variabel Indeks Pembangunan Manusia sedangkan Belanja Modal menurunkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Dana Alokasi Umum memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap IPM namun dapat memperlemah pengaruh Belanja Modal pada IPM.

Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Winda Putri Lestari (2017) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal” dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2015, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2015.

Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Lindri Puspitasari (2015) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening” yang menggunakan metode analisis jalur (path analysis) yang merupakan perluasan regresi linier. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa belanja modal secara signifikan mempengaruhi Pertumbuhan kinerja keuangan. Sedangkan hasil analisis jalur menunjukkan bahwa belanja modal dapat berpengaruh langsung ke kinerja (PDRB) dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari belanja

modal ke Pendapatan Asli Daerah (sebagai variabel intervening) lalu ke kinerja (PDRB).

Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya (2014) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi” yang menggunakan metode Moderated Regression Analysis (MRA). Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdullah(2015) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan” yang menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pola manajemen pemerintah daerah mempertimbangkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pola manajerial pemerintah daerah tidak mempertimbangkan dana alokasi umum (DAU) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan

bahwa pola manajemen pemerintah daerah tidak mempertimbangkan dana alokasi khusus (DAK) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Erna Santoso (2017) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal” yang menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Secara simultan, variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Gde Novitasari (2017) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali” dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sementara pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Tabel 2.1
Tinjauan Empiris

NO	NAMA PENULIS/TAHUN	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	FARIZ	Analisis Kinerja	Kuantitatif	Rata-rata kinerja

	SYAHIDI/2017	Keuangan Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Banjar	deskriptif: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Banjar, 2013, 2014, dan 2015	pengelolaan keuangan pada rasio efisiensi tahun 2013, 2014 dan 2015 tidak efisien. Hal ini dikarenakan tidak adanya penghematan pada belanja tidak langsung atau pembayaran gaji PNS.
2.	WINDA PUTRI LESTARI/2017	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Kuantitatif: Provinsi Jawa Timur, 2012, 2013, 2014 dan 2015	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2015, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2015.
3.	FARAH WAHYU FAUZIA/2017	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal	Kuantitatif: Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2012, 2013, 2014, dan 2015	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
4.	PUTU MILAN PRADNYANTARI /2017	Pengaruh Pendapatan Belanja Daerah Dan Belanja Modal Pada IPM Dengan Variabel Pemoderasi Dana Alokasi Umum	Kuantitatif yang berbentuk asosiatif: Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2015	Pendapatan Asli Daerah mampu meningkatkan variabel Indeks Pembangunan Manusia sedangkan Belanja Modal menurunkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Dana Alokasi Umum memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah

				terhadap IPM namun dapat memperlemah pengaruh Belanja Modal pada IPM.
5.	AGUS PRIAMBODO/2015	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah, belanja modal, dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
6.	AGUS WAHYUDIN/2014	Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota diJawa	Kuantitatif: Kabupaten/Kota diJawa, 2010	Secara parsial variabel PAD, DBH, dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel DAU mempunyai arah negative dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
7.	IDA BAGUS BADI/2017	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali	Kuantitatif: Kabupaten/Kota Bali,	Pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana untuk alokasi dana khusus tidak mempengaruhi alokasi belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah dan sisanya berpengaruh positif terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran dan alokasi belanja modal.
8.	NI LUH GDE	Pengaruh	Kuantitatif dan	pertumbuhan ekonomi,

	NOVITASARI/ 2017	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali	Kualitatif: Kabupaten/Kota Se-Bali, 2012, 2013, 2014 dan 2015	dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sementara pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
9.	EGI NOFRIZAL/ 2017	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015	Deskriptif Kuantitatif: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015	Perkembangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011-2015 untuk pertumbuhan ekonomi selalu mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya sedangkan perkembangan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi. Berdasarkan uji t pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal dan pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uji F pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal.
10.	YANGGI NINGSASRA/2016	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran	Assosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dimana tingkat signifikan masing-masing adalah 0.0069 dan 0.000.

		Belanja Modal	yang lainnya: 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013	
--	--	---------------	--	--

C. Kerangka Konsep

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004:73). Menurut KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 02, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Ardhani, 2011).

Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung, sedangkan secara tidak langsung belanja modal

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening (Nugroho, 2012). Upaya dalam menggenjot belanja modal merupakan perkara yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat meningkatkan produktivitas perekonomian sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan semakin besar alokasi belanja modal pada tahun selanjutnya. Hal ini akan memberi dampak yang baik terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ketahun secara terus-menerus.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli daerah

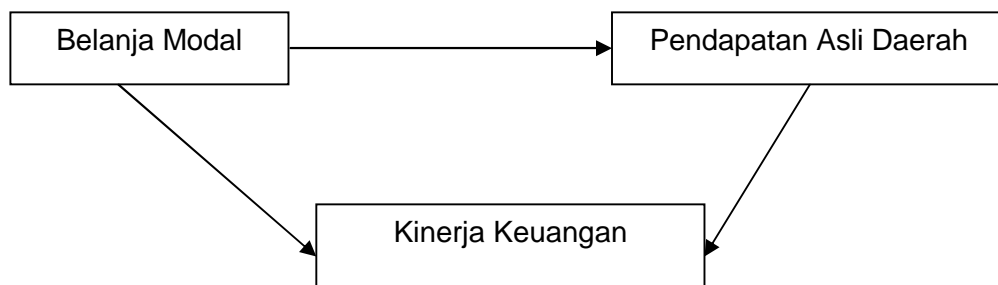
Suatu daerah untuk menambah aset tetap daerahnya yang dapat berupa pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk pelayanan publik, Maka pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam anggaran pendapatan belanja daerahnya, Sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan PAD.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai Variabel Intervening

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:94). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat

dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri.

Pemerintah dapat menggenjot PAD melalui pungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik yang bersumber dari dana yang telah dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Sehingga pemerintah daerah secara terus-menerus dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangannya. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007).



Gambar 2.1 Kerangka konsep penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya, apakah hasil penelitian akan menerima atau menolak hipotesis tersebut. adapun hipotesis yang diduga dari penelitian ini antara lain :

1. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif karena data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ialah data yang berbentuk angka-angka.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi/tempat penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan.

C. Definisi Variabel Dan Operasional Variabel

1. Definisi Variabel

- a. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalis aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.
- b. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Kinerja Keuangan adalah pencapaian prestasi yang dapat diperlihatkan dalam suatu perusahaan. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran²

2. Definisi Operasional Variabel

Operasional Variabel dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini

Tabel 2.2

Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan (Variabel Dependen)	Kinerja Keuangan adalah pencapaian prestasi yang dapat diperlihatkan dalam suatu perusahaan. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Pengukuran	Rasio pertumbuhan (growth ratio)	Rasio

	kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran.		
Belanja Modal (Variabel Independen)	Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.	Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan, Belanja Aset Tetap lainnya	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Variabel Intervening)	Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah	Rasio

	di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah	
--	--	---	--

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus (Sabar,2007).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Sampel

Sampel menunjukkan bagian dari populasi, berisi beberapa anggota yang dipilih dari populasi.

Pengertian dari sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya (Sabar,2007).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sampel dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2008 sampai tahun 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan data melalui keterangan secara tertulis berupa dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan khususnya data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama 10 tahun (2008-2017), gambaran umum perusahaan atau latar belakang perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

F. Teknik Analisis

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah perhitungan dengan menggunakan :

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan sebagainya (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pertumbuhan kinerja keuangan daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas terhadap data.

3. Analisis Jalur (Path Analysis)

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis regresi dengan variabel intervening. Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode

analisis jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi untuk mengestimasi hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Berdasarkan analisis jalur dapat diketahui besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel. Pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel dapat dilihat sebagai berikut:

Pengaruh langsung BM KK

Pengaruh tidak langsung BM PAD KK

Persamaan matematis untuk hubungan yang dihipotesiskan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PAD = b_1 BM + e \dots\dots\dots (H1)$$

$$KK = b_1 BM_{t-1} + b_2 PAD_t + e \dots\dots\dots (H2)$$

Keterangan dari Masing-masing lambang yang digunakan adalah:

BM = Belanja Modal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

KK = Kinerja Keuangan

b₁, b₂ = Koefisien

e = Error

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kep. Selayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja BPKPAD Kab. Kep. Selayar.

2. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan profesional”

Misi :

BPKPAD Kab. Kep. Selayar adalah merupakan lembaga/satuan kerja yang merumuskan dan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Bupati.

BPKPAD Kab. Kep. Selayar sebagai pembina administratif pengelolaan keuangan daerah menjalankan fungsi PPKD yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku yang sangat menentukan kelancaran dan efektifitas kinerja birokrasi seluruh satuan kerja perangkat daerah.

Akuntabel atau akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Profesional adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seseorang.

3. Struktur Organisasi

4. *Job Description* (Uraian Tugas)

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Badan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.
4. Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan dipimpin oleh Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi hukum.
5. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
6. Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penunjang perencanaan pembangunan daerah di bidang anggaran.

7. Sub Bidang Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjanganggaran daerah.
8. Sub Bidang Anggaran Desa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Anggaran melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknisfungsi penunjang anggaran desa.
9. Sub Bidang Anggaran Bantuan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjanganggaran bantuan keuangan daerah.
10. Bidang Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yaitu menyusun danmelaksanakan kebijakan teknis penunjang perencanaan pembangunan daerah di bidang pembiayaan.
11. Sub Bidang Pengelolaan Kas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembiayaan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang pengelolaan kas.
12. Sub Bidang Pengelolaan Gaji dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembiayaan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjangpengelolaan gaji.

13. Sub Bidang Verifikasi Dokumen dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembiayaan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang verifikasi dokumen.
14. Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penunjang perencanaan pembangunan daerah di bidang akuntansi.
15. Sub Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang akuntansi.
16. Sub Bidang Pembukuan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang pembukuan.
17. Sub Bidang Neraca Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang neraca daerah.
18. Bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penunjang perencanaan pembangunan daerah di bidang pendapatan.

19. Sub Bidang Pendapatan dan Pendaftaran dipimpin oleh Kepala SubBidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang pendataan dan pendaftaran.
20. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjangpenilaian dan penetapan.
21. Sub Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pelaporan dipimpin Kepala oleh SubBidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjangpenagihan, pengawasan, dan pelaporan.
22. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah di bidang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
23. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknisfungsi penunjang pendataan dan pendaftaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

24. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknisfungsi penunjang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan penilaian dan penetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

25. Sub Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknisfungsi penunjang penagihan, pengawasan, dan pelaporanpajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

26. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset Daerah

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan dan pemanfaatan.

27. Sub Bidang Penatausahaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Aset Daerah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang Penatausahaan.

28. Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Aset Daerah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang pengamanan dan penghapusan.

B. HASIL DARI PENELITIAN

Pembahasan pada bab ini meliputi hasil penelitian untuk menguji secara empiris tentang pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan dampaknya pada Kinerja Keuangan Pada BPKPAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan pembahasan.

1. Statistic Data

Catatan Akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas. Teknik pengumpulan data telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sampel penelitian ini adalah data laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2008 sampai 2017. Adapun komponen data penelitian sebagai berikut:

a. Komponen Belanja modal

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memperoleh Aset tetap dan atau Aset lainnya untuk keperluan keperluan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh Masyarakat Umum. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh Masyarakat umum. Adapun komponen belanja modal berdasarkan kebijakan keuangan disajikan 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Belanja Modal Pemda Kab. Selayar
Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2017

No	Tahun	BELANJA MODAL					Total Belanja Modal
		Belanja Tanah	Belanja peralatan dan Mesin	Belanja Gedung dan Bangunan	Belanja jalan, irigasi dan Jaringan	Belanja Aset Tetap Lainnya	
1	2008	7732968594	26784679027	47675424906	52195687782	7577986864	141.966.747.173
2	2009	4975356263	22161066323	29968674862	92620739225	701887608	150.427.724.282
3	2010	3056928500	16240211740	17789920080	48849451469	971151379	86.906.663.168
4	2011	1765199950	11804565683	21504031150	43824044730	355642379	79.253.483.892
5	2012	5859217400	15024640738	35339947962	25772444365	3081795000	85.078.045.465
6	2013	2.693.942.500	19.525.341.115	43.037.571.868	90.089.501.502	421.800.000	155.768.156.985
7	2014	2.913.564.500	19.665.762.392	37.623.419.817	105.799.117.152	2.638.738.255	168.765.462.116
8	2015	5,184,990,800	30,971,762,950	40,814,881,794	105,116,541,229	271,424,900	182,359,601,673
9	2016	844.515.450	46.554.858.175	40.556.439.888	155.190.237.527	2.042.370.000	245.188.421.040
10	2017	4.652.000.000	35.734.193.547	32.035.717.114	93.529.082.594	7.056.977.254	173.007.970.509

Sumber Data: CaLK Pemda Kab. Selayar

Berdasarkan dari tabel 4.1 dapat diuraikan Belanja Modal Pemda Kabupaten Selayar tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Selayar pada TA 208 adalah sebesar Rp 141.966.747.173 atau 82,63% dari yang dianggarkan belanja modal sebesar Rp 180.736.907.873.
- b. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2009 adalah sebesar Rp 150.427.724.282 atau 88,63% dari yang dianggarkan belanja modal sebesar Rp 169.296.497.747.
- c. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2010 adalah sebesar Rp 86.907.663.168 atau 82,63% dari yang dianggarkan belanja modal sebesar Rp 104.244.366.560.
- d. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2011 adalah sebesar Rp 79.253.483.892 atau 68,63% dari yang dianggarkan belanja modal sebesar Rp 116.226.625.000.
- e. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2012 adalah sebesar Rp 85.078.045.465 atau 82,63% dari yang dianggarkan belanja modal sebesar Rp 104.244.366.560.
- f. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2013 adalah sebesar Rp 155.768.156.985 atau 81,63% dari yang dianggarkan belanja modal sebesar Rp 190.689.790.155.
- g. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2014 adalah sebesar Rp 168.765.462.166 atau 82,63% dari yang dianggarkan belanja modal sebesar Rp 204.244.366.560.
- h. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2015 adalah sebesar Rp 182.359.601.673 atau 81,64% dari yang dianggarkan belanja modal sebesar Rp 223.363.363.880.

- i. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2016 adalah sebesar Rp 245.188.421.040 atau 86,35% dari yang dianggarkan belanja modalsebesar Rp 283.951.111.079.
- j. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2017 adalah sebesar Rp 173.007.970.509 atau 90,91% dari yang dianggarkan belanja modalsebesar Rp 190.312.834.006

b. Komponen Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Adapun komponen pendapatan asli daerah berdasarkan kebijakan keuangan disajikan 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
PAD Pemda Kab. Selayar
Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2017

No	Tahun	PAD				Total PAD
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	
1	2008	1503862500	2334917000	2020000000	7518675200	13.377.454.700
2	2009	1422255272	1823448500	5480237615	4655039272	13.380.980.661
3	2010	1632652550	1404327898	6340213815	5381671688	14.758.865.951
4	2011	1541501795	1534924604	6610754300	5508549085	15.195.729.784
5	2012	2101870175	2187788120	6561783074	6378285213	17.229.726.583
6	2013	2.457.847.693	2.653.680.672	7.162.295.947	10.118.165.226	22.391.989.539
7	2014	4.184.916.862	4.184.916.862	7.587.079.072	16.453.937.198	35.602.098.989
8	2015	6,087,786,310	8,750,480,694	9,762,028,920	15,630,717,556	40,231,013,481
9	2016	6.635.495.792	10.672.596.122	10.584.859.991	15.900.777.881	43.793.729.786
10	2017	7.512.613.362	1.527.406.655	11.164.786.664	57.095.279.585	77.300.086.267

Sumber Data: CaLK Pemda Kab. Selayar

Berdasarkan dari tabel 4.3 dapat diuraikan PAD Pemda Kabupaten Selayar periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2008 adalah sebesar Rp 13.380.980.661 atau 62,63% dari rencana penerimaan sebesar Rp 14.516.849.454.
- b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2009 adalah sebesar Rp 13.380.980.661 atau 62,63% dari rencana penerimaan sebesar Rp 21.489.086.000.
- c. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2010 adalah sebesar Rp 14.758.865.951 atau 76,63% dari rencana penerimaan sebesar Rp 18.117.097.000.
- d. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2011 adalah sebesar Rp 15.195.729.784 atau 101,63% dari rencana penerimaan sebesar Rp 15.000.000.000.
- e. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2012 adalah sebesar Rp 17.229.726.583 atau 86,63% dari rencana penerimaan sebesar Rp 20.742.492.000.
- f. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2013 adalah sebesar Rp 22.391.989.539 atau 94,63% dari rencana penerimaan sebesar Rp 23.572.884.000.
- g. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2014 adalah sebesar Rp 35.602.098.989 atau 99,63% dari rencana penerimaan sebesar Rp 35.742.492.000.
- h. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2015 adalah sebesar Rp 40.231.013.481 atau 90,13% dari rencana penerimaan sebesar Rp 44.634.937.000.

- i. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2016 adalah sebesar Rp 43.793.729.786 atau 83,55% dari rencana penerimaan sebesar Rp 52.416.704.800.
- j. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2017 adalah sebesar Rp 77.300.086.267 atau 84,13% dari rencana penerimaan sebesar Rp 91.886.920.000.

c. Komponen Kinerja Keuangan

Untuk mengukur kinerja, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, kita dapat melakukannya dengan menggunakan perhitung Rasio Pertumbuhan. Adapun komponen Kinerja Keuangan berdasarkan kebijakan keuangan disajikan 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kinerja Keuangan Pemda Kab. Selayar
Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017

No	Tahun	PAD	Pertumbuhan	Persentase
1	2008	13.377.454.700	-	0.0%
2	2009	13.380.980.661	3.525.961	0.03%
3	2010	14.758.865.951	1.377.885.290	10.3%
4	2011	15.195.729.784	436.863.833	2.96%
5	2012	17.229.726.583	2.033.996.799	13.39%
6	2013	22.391.989.539	5.162.262.956	29.96%
7	2014	35.602.098.989	13.210.109.450	58,9%
8	2015	40,231,013,481	4.628.914.492	13%
9	2016	43.793.729.786	3.562.716.305	8,8%
10	2017	77.300.086.267	33.506.356.481	76,5%

Sumber Data: CaLK Pemda Kab. Selayar.

Berdasarkan dari tabel 4.3 dapat diuraikan Kinerja Keuangan Kabupaten Selayar periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2008 adalah sebesar Rp 13.380.980.661 atau 62,63% dari rencana penerimaan sebesar

- Rp 14.516.849.454. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2007 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,0%.
- b. Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2009 adalah sebesar Rp 13.380.980.661 atau 62,63% dari rencana penerimaan sebesar Rp 21.489.086.000. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2008 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 3.525.961 atau 0,03%.
- c. Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2010 adalah sebesar Rp 14.758.865.951 atau 76,63% dari rencana penerimaan sebesar Rp 18.117.097.000. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2009 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 31.377.885.290 atau 10,3%.
- d. Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2011 adalah sebesar Rp15.195.729.784 atau 101,6% dari rencana penerimaan sebesar Rp 15.000.000.000. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2010 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 436.863.833 atau 2,96%.
- e. Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2012 adalah sebesar Rp 17.229.726.583 atau 86,63% dari rencana penerimaan sebesar Rp 20.742.492.000. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2011 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 2.033.996.799 atau 13,39%.
- f. Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2013 adalah sebesar Rp 22.391.989.539 atau 94,63% dari rencana penerimaan sebesar Rp 23.572.884.000. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2012

Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 5.162.262.956 atau 29,96%.

- g. Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2014 adalah sebesar Rp35.602.098.989 atau 99,63% dari rencana penerimaan sebesar Rp 35.742.492.000. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2013 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 13.210.109.450 atau 58,9%.
- h. Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2015 adalah sebesar Rp40.231.013.481 atau 90,13% dari rencana penerimaan sebesar Rp 44.634.937.000. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2014, Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 4.629.914.492 atau 13%.
- i. Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2016 adalah sebesar Rp43.793.729.786 atau 83,55% dari rencana penerimaan sebesar Rp 52.416.704.800. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2015, Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 3.562.716.305 atau 8,8%.
- j. Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Selayar pada TA 2017 adalah sebesar Rp77.300.086.267 atau 84,13% dari rencana penerimaan anggaran Rp 91.886.920.000. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2016, Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 33.506.356.481 atau 76,5%.

d. Komponen Deskriptif Sampel Penelitian

Dari hasil penghitungan komponen belanja modal, komponen pendapat asli daerah dan komponen kinerja keuangan, maka dapat diketahui Deskriptif Sampel penelitian yang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Deskriptif Sampel penelitian

No	Tabel	Variabel		
		Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah	Kinerja Keuangan
1	2008	141.966.747.173	13.377.454.700	0.0%
2	2009	150.427.724.282	13.380.980.661	0.03%
3	2010	86.906.663.168	14.758.865.951	10.3%
4	2011	79.253.483.892	15.195.729.784	2.96%
5	2012	85.078.045.465	17.229.726.583	13.39%
6	2013	155.768.156.985	22.391.989.539	29.96%
7	2014	168.765.462.116	35.602.098.989	58,9%
8	2015	182,359,601,673	40,231,013,481	13%
9	2016	245.188.421.040	43.793.729.786	8,8%
10	2017	173.007.970.509	77.300.086.267	76,5%

Sumber Data: CaLK Pemda Kab. Selayar

Adapun Analisis data penelitian yang dilakukan, melalukan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan analisis data seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, mean, dan standard deviation dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis statistic deskriptif disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	10	7.93E10	2.45E11	1.4687E11	5.18442E10
Pendapatan Asli Daerah	10	1.34E10	7.73E10	2.9326E10	2.05047E10
Kinerja Keuangan	10	.00	76.51	21.4000	26.23239
Valid N (listwise)	10				

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh Nilai rata-rata (mean) dari belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Selayar adalah Rp 1.4687E11 dengan standar deviasi sebesar 5.18442E10. Nilai

terendah dari belanja modal adalah Rp 79.253.483.892 pada tahun 2011 sedangkan nilai (maksimum) dari belanja modal adalah Rp 245.188.421.040 tahun 2017.

Nilai rata-rata (mean) dari pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Selayar adalah Rp 2.9326E10 dengan standar deviasi sebesar 2.05047E10. Nilai terendah (minimum) dari pendapatan asli daerah adalah Rp 13.377.454.700 pada tahun 2008 Sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari pendapatan asli daerah adalah Rp 77.300.086.267 pada tahun 2017.

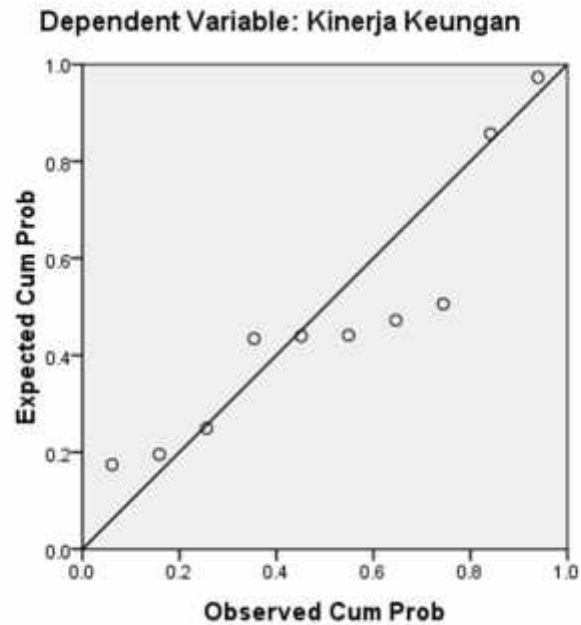
Nilai rata-rata (mean) dari kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Selayar adalah 21.4000 persen sedangkan standar deviasi sebesar 26.23239. Nilai terendah (minimum) dari kinerja keuangan adalah 0 persen pada tahun 2008 sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari kinerja keuangan adalah 76.51 persen pada tahun 2017

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas maka akan terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas menggunakan normal probability plot, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai $p > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel probability plot yang diteliti terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada gambar 4.2 dibawah ini:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2

UJI NORMALITAS

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Dari normal probability plot di atas dapat dilihat secara seksama bahwa data menyebar sekitar garis diagonal atau mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menguji nilai residual dengan Kolmogorov-Smirnov. Untuk menguji distribusi residual normal atau tidak, maka dapat dilakukan metode uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6
HASIL UJI NORMALITAS (K-S TEST)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	15.26067515
Most Extreme Differences	Absolute	.293
	Positive	.293
	Negative	-.144
Kolmogorov-Smirnov Z		.928
Asymp. Sig. (2-tailed)		.355
a. Test distribution is Normal.		

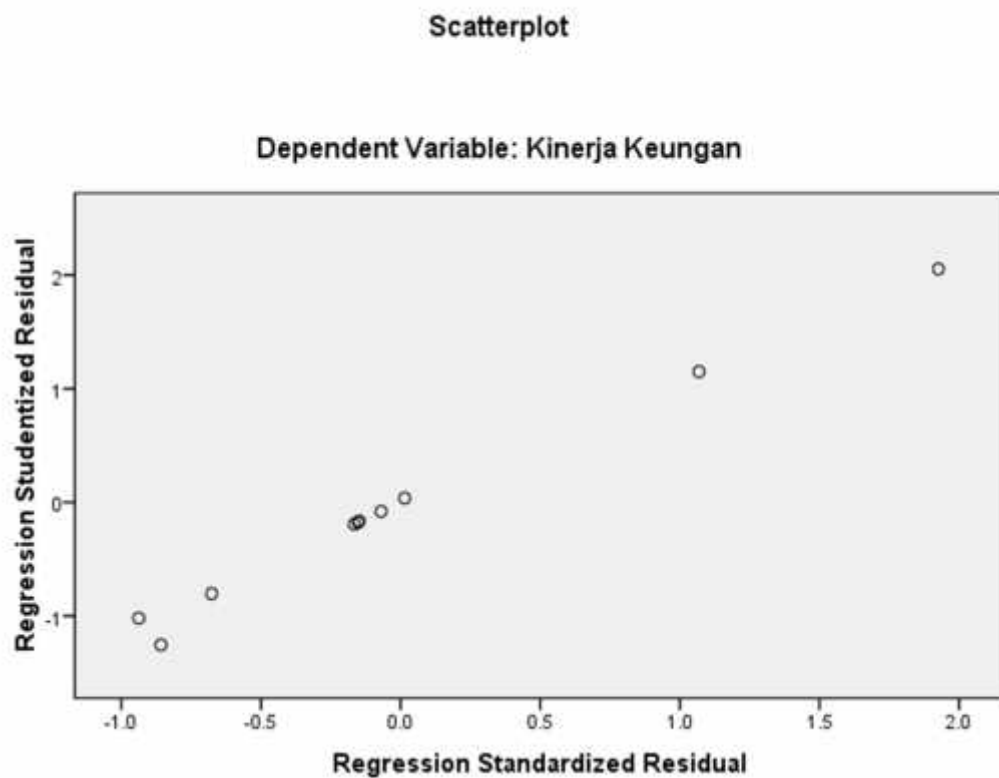
Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Tabel 4.6 menunjukkan Nilai K-S sebesar 0,928 (sig 0,355) untuk semua variabel tersebut diatas 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel belanja modal, pendapatan daerah, kinerja keuangan secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

b. Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi heterokedastisitas dapat melalui grafik scatterplot deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X dan Y menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Seperti terlihat pada gambar 4.3 dibawah ini:

Gambar 4.3
HETEROKEDASTISITAS



Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Pada gambar 4.3 jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat di simpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastitas atau HO di terima yang berarti modal regresi ini layak untuk memprediksikan variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen.

c. Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 4.7
UJI MULTIKOLINEARITAS

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Belanja Modal	.640	1.561
	Pendapatan Asli Daerah	.640	1.561

a. Dependent Variable: Kinerja keuangan

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat di simpulkan bahwa nilai Tolerance semua variabel lebih besar 0,05 (>5%) serta nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10 (VIF<10). Maka dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

3. Hasil Analisis Jalur (Path Analysis)

a. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan path analysis dengan dua persamaan yaitu:

$$1. PAD = b_1 BM + e_1$$

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan diperoleh kesimpulan bahwa model sudah dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis). Pengujian hipotesis pertama (H1) untuk menguji belanja modal terhadap pendapatan asli daerah. Nilai koefisien path dapat dilihat pada Tabel 4.8:

Tabel 4.8
UJI REGRESI UNTUK PERSAMAAN 1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.698	26.717		.064	.951
Belanja Modal	-1.341E-10	.000	-.265	-.778	.459

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan perhitungan path analysis, pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah diperoleh koefisien jalur sebesar -0,265. Dan pengaruh belanja modal signifikan sebesar 0,459 maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh belanja modal berpengaruh negative dan tidak signifikan. Oleh kaerana $-0,265 < 0$, maka H1 ditolak.

$$2. KK = b_1 BM_{t-1} + b_2 PAD_t + e_2$$

Pengujian hipotesis kedua dan ketiga (H2, H3) untuk menguji belanja modal melalui pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan.

Tabel 4.9
UJI REGRESI UNTUK PERSAMAAN 2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.467	17.341		.488	.640
Belanja Modal	-1.574E-10	.000	-.311	-1.132	.295
Pendapatan Asli Daerah	1.229E-9	.000	.861	3.497	.010

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.467	17.341		.488	.640
Belanja Modal	-1.574E-10	.000	-.311	-1.132	.295
Pendapatan Asli Daerah	1.229E-9	.000	.861	3.497	.010

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan perhitungan path analysis tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan diperoleh koefisien jalur sebesar 0,861. Dan pengaruh belanja modal signifikan sebesar 0,010 maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh belanja modal berpengaruh positif dan signifikan. Oleh karena $0,861 > 0$, maka H2 diterima.

Berdasarkan perhitungan path analysis pada Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa belanja modal berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan tetapi belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah. Oleh karenanya, H3 diterima.

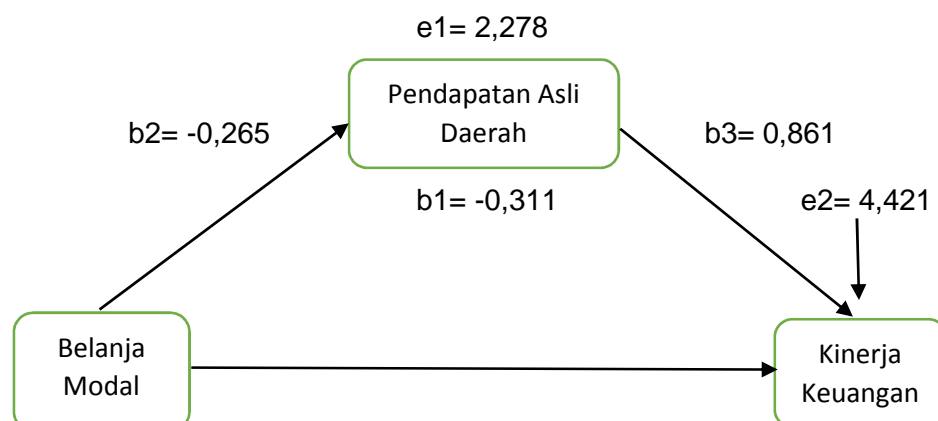
b. Diagram Path

Dari hasil path analysis dapat dilihat dalam persamaan berikut:

$$PAD = b_1 BM + e_1$$

$$KK = b_1 BM_{t-1} + b_2 PAD_t + e_2$$

Hasil dalam bentuk diagram ditunjukkan pada Gambar 4. 4 sebagai berikut:



Gambar 4.4

HASIL DIAGRAM PATH

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

C. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini mengenai adanya pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah. Dari Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel belanja modal (X) terhadap pendapatan asli daerah (Z) menunjukkan angka negatif. Ini berarti bahwa semakin kecil belanja modal yang dibelanjakan dapat menurunkan pendapatan asli daerah. Hasil pengolahan data dengan menggunakan path analysis dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10

**Pengaruh Belanja Modal (X) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Z)
Secara Langsung Dan Tidak Langsung**

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
X ke Z	$(-0,265)^2 \times 100\% = 8,41\%$		7,02%
Pengaruh Secara Simultan			7,02%
Variabel Lain			92,9%

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa pengaruh variabel belanja modal (X) terhadap pendapatan asli daerah (Z) secara langsung sebesar 0,702

atau 7,02%. Dengan demikian belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sisanya sebesar 92,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis kedua dalam penelitian ini mengenai adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Dari gambar 4.4 dapat dilihat bahwa koefisien dari pendapatan asli daerah (Z) terhadap kinerja keuangan (Y) adalah positif. Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah akan sangat mendukung pertumbuhan kinerja keuangan. Hasil pengolahan data dengan menggunakan path analysis dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Z) Terhadap Kinerja Keuangan (Y)
Secara Langsung Dan Tidak Langsung

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
Z ke Y	$(0,861)2 \times 100\% = 74,1\%$		74,1%
Pengaruh Secara Simultan			74,1%
Variabel Lain			25,9%

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa pengaruh variabel pendapatan asli daerah (Z) terhadap kinerja keuangan (Y) 0,741 atau 74,1%. Dengan demikian pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan sisanya sebesar 25,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini mengenai adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah. Dari Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel belanja modal (X) terhadap kinerja keuangan (Y) menunjukkan angka negatif.

Ini berarti belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan tetapi belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan path analysis pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Pengaruh Belanja Modal (X) Terhadap kinerja Keuangan (Y) Melalui
Pendapatan Asli Daerah (Z) Secara Langsung Dan Tidak Langsung

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
X ke Y	$(-0,311) \times 100\% = 9,6\%$		9,6%
Z ke Y	$(0,861) \times 100\% = 74,1\%$		74,1%
X ke Y Melalui Z		$2(-0,11 \times 0,961 \times -0,265) \times 100\% = 14,1\%$	14,1%
Pengaruh Secara Simultan			97,8%
Variabel Lain			2,2%

Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Dari Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa pengaruh variabel belanja modal (X) terhadap kinerja keuangan (Y) secara langsung sebesar 9,6%. Pengaruh variabel pendapatan asli daerah (Z) terhadap kinerja keuangan (Y) secara langsung sebesar 74,1%. Pengaruh tidak langsung variabel belanja modal (X) terhadap kinerja keuangan (Y) melalui pendapatan asli daerah (Z) sebesar 14,1%.

Jadi total pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung sebesar 97,8% (merupakan penjumlahan antara 9,6% + 74,1% + 14,1%). Dengan demikian belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah, sisanya sebesar 2,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diketahui jawaban dari hipotesis pada bab sebelumnya, yaitu :

1. Belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga hipotesis 1 ditolak'
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis 2 diterima
3. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah, sehingga hipotesis 3 diterima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh negative dan tidak signifikan.
2. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan.
3. Belanja modal berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan tetapi belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran sebagai berikut :

1. Kepada peneliti selanjutnya dapat memilah jumlah belanja modal yang digunakan pemerintah untuk membiayai pemebangunan infrastruktur yang dapat menghasilkan PAD dengan pemebangunan infrastruktur yang tidak dapat menghasilkan PAD
2. Memperluas obyek penelitian yang tidak terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi selatan saja dengan menambah kabupaten/kota Provinsi lain sebagai sampel, sehingga memungkinkan adanya perbandingan belanja modal yang mempengaruhi kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawanti, Dri, Abdullah dan Febriansyah. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatra Bagian Selatan*. Jurnal Akuntansi Vo. 3 No. 1, ISSN : 2303-0356.
- Fauzia, Farah Wahyu dan Ikhsan Budi Riharjo. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol 6 No. 6 Hlm. 1-20. ISSN : 2460-0585.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 7 No.1 Hlm. 79-92, ISSN: 2302-8556.
- Lestari, Winda Putri dan Sapari. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Jurnal Riset dan Ilmu Akuntansi Vol 6 No. 6 Hlm. 1-17. ISSN : 2460-0585.
- Pradnyantari, Putu Milan & A.A.N.B. Dwirandra. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Modal Belanja Pada IPM dengan Variabel Pemoderasi Dana Alokasi Umum*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 19 No. 1 Hlm. 536-564. ISSN: 2302-8556.
- Puspitasari, Ni Luh Putu Lindri, Made Pradana Adiputra dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2015. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening*. Jurusan Akuntansi Program S1 Vol. 3 No. 1.
- Santoso, Erna dan Sapari. 2017. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 3, ISSN : 2460-0585.
- Sari, Desak Gede Yudi Atika, Putu Kempramareni dan N.L.G Novitasari. 2017. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali* Jurnal KRISNA, Vol. 9 No. 1 Hlm. 15-29,ISSN : 2301-8879.
- Sholikhah, Imroatus dan Agus Wahyudin. 2014. *Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa*. Accounting Analysis Journal 3 (4) (2014). ISSN 2252-6765.

Syaputra, Ryanda dan Darwanis. 2014. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol 1 No. 2 Hlm. 183-199.